

PERSUASIVE COMMUNICATION IN THE ENFORCEMENT OF SMOKE-FREE AREAS BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN BOGOR REGENCY, WEST JAVA PROVINCE, INDONESIA

KOMUNIKASI PERSUASIF PENERTIBAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Rafii Abdul Gani¹, Syaefullah²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

*syaefullahishak1967@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the persuasive communication carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bogor Regency in enforcing Smoke-Free Areas (SFAs) as the implementation of Bogor Regency Regional Regulation Number 8 of 2016. The study is motivated by the continued occurrence of smoking violations in public spaces, the low level of public compliance, and the importance of a humane and educational approach in supporting the successful implementation of the SFA policy. The focus of the study includes persuasive communication strategies, implementation barriers, and their effectiveness in increasing public awareness. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Informants consisted of representatives from the Civil Service Police Unit, local government agencies, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that persuasive communication was implemented through direct socialization, humane appeals, the installation of informational media, routine patrols, and inter-agency coordination. This approach has been reasonably effective in increasing public awareness; however, it has not yet achieved optimal results, as violations are still found. The main obstacles include low public awareness, a smoking culture, limited personnel, and uneven supervision. The study concludes that persuasive communication is effective in supporting the enforcement of Smoke-Free Areas, but it must be complemented by continuous monitoring and stronger inter-agency collaboration to optimize policy implementation.

Keywords: *Persuasive Communication, Smoke-Free Areas, Civil Service Police Unit, Public Order Enforcement, Public Awareness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian dilatarbelakangi masih adanya pelanggaran merokok di ruang publik, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta pentingnya pendekatan humanis dan edukatif dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR. Fokus penelitian meliputi strategi komunikasi persuasif, hambatan pelaksanaan, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari unsur Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dilakukan melalui sosialisasi langsung, imbauan humanis, pemasangan media informasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat, namun belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya merokok, keterbatasan personel, dan pengawasan yang belum merata. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif efektif diterapkan, tetapi perlu didukung pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi antar instansi agar implementasi KTR lebih optimal.

Kata Kunci: Komunikasi Persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja, Kawasan Tanpa Rokok, Penertiban.

1. PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu produk konsumsi yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara global. Kandungan zat berbahaya dalam rokok, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, serta berbagai senyawa karsinogenik, menjadikan aktivitas merokok sebagai faktor risiko utama berbagai penyakit kronis, antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan sistem pernapasan (A'yuni & Nasrullah, 2021). Organisasi kesehatan dunia mencatat bahwa konsumsi tembakau menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun, yang terdiri dari sekitar 7 juta kematian akibat perokok aktif dan 1,2 juta kematian akibat paparan asap rokok pada perokok pasif. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak merokok tidak hanya dirasakan oleh individu yang merokok, tetapi juga oleh masyarakat luas yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya (Fariz Kahendra et al., 2023).

Di Indonesia, permasalahan merokok masih menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi perokok pada kelompok usia di atas 15 tahun masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu 28,1%, sementara pada kelompok usia remaja 10–18 tahun mencapai 7,4%. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa perilaku merokok telah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat yang sulit dikendalikan, bahkan telah menjangkau kelompok usia produktif dan generasi muda. Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting karena dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (Marchel, 2019).

Permasalahan tingginya angka perokok juga terlihat secara regional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah dengan jumlah perokok aktif cukup tinggi di Indonesia. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengendalian perilaku merokok. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 5 juta jiwa, potensi paparan asap rokok di ruang publik menjadi semakin besar. Data menunjukkan bahwa persentase perokok di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di berbagai kelompok usia, baik pada remaja, usia produktif, hingga lanjut usia (Wulandari et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa perilaku merokok masih menjadi fenomena yang dinamis dan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Secara normatif, negara telah memberikan landasan hukum dalam upaya pengendalian konsumsi rokok melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, termasuk udara yang bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Kebijakan ini mengatur larangan aktivitas merokok di berbagai fasilitas umum seperti tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja, serta ruang publik lainnya (Rochka, M. M., Anwar, A. A., & Rahmadani, 2019).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas merokok di wilayah Kabupaten Bogor. Selain menetapkan area yang dilarang untuk merokok, kebijakan ini juga mendorong penyediaan ruang khusus merokok sebagai solusi kompromi antara hak perokok dan hak masyarakat non-perokok (Fatonah S, Amatiria, 2021). Ruang khusus merokok dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terpisah dari area publik, memiliki ventilasi yang memadai, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung agar asap rokok tidak menyebar ke lingkungan sekitar.

Meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR di beberapa fasilitas umum masih tergolong rendah (Afriato, 2020). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok, minimnya sosialisasi

kebijakan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, masih ditemukan perilaku merokok di area yang seharusnya bebas dari asap rokok, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks penegakan kebijakan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP sering menghadapi tantangan berupa resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam proses penertiban.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga perlu didukung dengan strategi komunikasi yang efektif. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah komunikasi persuasif, yaitu proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara sukarela. Melalui komunikasi persuasif, aparat penegak dapat membangun hubungan yang lebih humanis dengan masyarakat, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan tanpa adanya paksaan.

Pendekatan komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting karena mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan perilaku masyarakat. Dengan memberikan edukasi, sosialisasi, serta pemahaman mengenai bahaya merokok dan pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KTR secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan strategi komunikasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada konteks tertentu, seperti lingkungan pendidikan atau pendekatan berbasis sanksi hukum. Kajian yang secara khusus membahas peran komunikasi persuasif oleh aparat penegak daerah dalam konteks penertiban KTR di ruang publik masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bogor. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bentuk dan strategi komunikasi yang digunakan, tetapi juga mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai komunikasi persuasif dalam konteks kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari paparan asap rokok bagi seluruh masyarakat.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satpol PP Kabupaten Bogor merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan landasan hukum seperti UU Kesehatan, UU Pemerintahan Daerah, PP Satpol PP, SOP Satpol PP, dan Perda KTR. Karena pelanggaran KTR berkaitan dengan kebiasaan sosial, pendekatan persuasif lebih efektif daripada tindakan represif. Mengacu pada teori komunikasi persuasif DeVito (2019), Satpol PP perlu memperkuat argumen, menggunakan daya tarik psikologis, dan menjaga kredibilitas saat menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Dengan mengintegrasikan dasar hukum, teori pemerintahan, dan strategi persuasi yang tepat, penertiban KTR dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mewujudkan ketertiban sesuai Perda yang

berlaku. Penelitian ini berjudul “Komunikasi Persuasif Penertiban Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait interaksi antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan publik. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta dan realitas empiris secara sistematis, sedangkan pendekatan induktif memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian (Creswell, 1998; Moleong, 2019; Sugiyono, 2017).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh (Devito, 2017), yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu penguatan argumen dan bukti, daya tarik psikologis, serta daya tarik kredibilitas. Ketiga dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang relevan dengan konteks penelitian, seperti kemampuan komunikasi aparat, penggunaan pesan verbal dan nonverbal, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksanaan penertiban KTR, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016, laporan kinerja, serta dokumen pendukung lainnya. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi KTR, seperti aparat Satpol PP, petugas lapangan, dan masyarakat.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka analisis yang digunakan, peneliti menyajikan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Tabel 4.1 Operasionalisasi Konsep Komunikasi Persuasif

Operasional Konsep Komunikasi Persuasif	
Dimensi	Cakupan
(1)	(2)
Memperkuat Argumen dan Bukti	1. Kecerdasan komunikator dalam melakukan komunikasi persuasif 2. Informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok 3. Kompetensi aparat Satpol PP dalam penertiban KTR 4. Kewibawaan aparat Satpol PP dalam melakukan komunikasi persuasif
Daya Tarik Psikologis	5. Komunikasi verbal Satpol PP menggunakan lisan maupun tulisan 6. Komunikasi vokal berkaitan intonasi penyampaian komunikasi persuasif 7. Komunikasi visual menggunakan elemen tampilan oleh Satpol PP
Daya Tarik Kredibilitas	8. Keahlian aparat Satpol PP dalam penyampaian komunikasi persuasif terkait KTR 9. Kepercayaan masyarakat terkait integritas aparat Satpol PP dalam penyampaian komunikasi persuasif 10. Kesukaan atau daya tarik masyarakat terhadap petugas Satpol PP dalam melakukan komunikasi persuasif

Sumber : DeVito 2019 (diolah oleh penulis, 2025)

Selain itu, peneliti juga mengolah data sekunder terkait pelanggaran KTR di Kabupaten Bogor dalam bentuk infografis untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi di lapangan.



Gambar 4.5 Data Pelanggaran KTR Kabupaten Bogor

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pencatatan pelanggaran KTR belum dilakukan secara konsisten setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas komunikasi persuasif yang dilakukan oleh aparat.

1. Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif menjadi pendekatan penting dalam pelaksanaan penertiban KTR karena menekankan pada perubahan perilaku masyarakat secara sukarela. Dalam praktiknya, Satpol PP Kabupaten Bogor telah menerapkan pendekatan ini, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat serta belum konsistennya pola komunikasi yang dilakukan di lapangan.

a. Memperkuat Argumen dan Bukti

Dimensi ini menekankan pada kemampuan aparat dalam menyampaikan pesan yang logis, berbasis data, serta didukung oleh regulasi yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi ini belum terpenuhi secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada keempat indikatornya.

b. Kecerdasan Komunikator

Kecerdasan komunikator merupakan kemampuan aparat dalam memahami situasi, mengelola pesan, serta menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan komunikator Satpol PP masih bersifat situasional. Artinya, komunikasi dilakukan hanya ketika terjadi pelanggaran, tanpa adanya pola yang terstruktur.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum dijadikannya program KTR sebagai prioritas utama. Akibatnya, aparat belum memiliki standar komunikasi yang baku dalam menyampaikan pesan persuasif.



Gambar 4.6 Jenis Penindakan KTR di Kabupaten Bogor

Ketiadaan data penindakan yang sistematis menunjukkan bahwa proses komunikasi belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak pada sulitnya melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi yang telah dilakukan.

a. Informasi Terkait KTR

Informasi merupakan elemen penting dalam komunikasi persuasif. Satpol PP telah menyampaikan informasi terkait dasar hukum, kawasan KTR, serta dampak kesehatan rokok. Namun, penyampaian informasi tersebut belum merata. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas lokasi KTR. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta minimnya media informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif belum didukung oleh strategi penyebaran informasi yang efektif. Padahal, keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

b. Kompetensi Aparat

Kompetensi aparat dalam komunikasi persuasif masih terbatas karena belum adanya pelatihan khusus terkait KTR. Kemampuan komunikasi yang dimiliki masih bersifat umum dan belum spesifik. Sebagian aparat telah mampu menyampaikan pesan dengan baik, namun masih terdapat variasi dalam kualitas komunikasi antar petugas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi belum merata. Kurangnya pelatihan dan pembinaan menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kompetensi ini.

c. Kewibawaan Aparat

Kewibawaan aparat sangat berpengaruh terhadap penerimaan pesan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewibawaan aparat masih bersifat situasional. Masyarakat cenderung patuh ketika ada petugas, namun kembali melanggar ketika tidak ada pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan belum terbentuk secara sistemik.

1. Daya Tarik Psikologis

Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana pesan disampaikan melalui aspek verbal, vokal, dan visual.

a. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal yang dilakukan aparat belum optimal. Penyampaian pesan masih bersifat singkat dan kurang memberikan penjelasan mendalam. Selain itu, komunikasi tertulis seperti papan larangan dan spanduk masih terbatas.



Gambar 4.7 Plang dan Banner Kawasan Tanpa Rokok

Minimnya media ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

a. Komunikasi Vokal

Komunikasi vokal meliputi intonasi, kejelasan suara, dan tempo bicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini belum merata. Sebagian aparat telah mampu menggunakan intonasi yang baik, namun masih terdapat variasi dalam penyampaian.



Gambar 4.8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi KTR

Kurangnya pelatihan menyebabkan komunikasi vokal belum optimal.

b. Komunikasi Visual

Komunikasi visual masih terbatas pada penggunaan seragam aparat. Pemanfaatan media visual seperti spanduk dan papan informasi belum maksimal.



Gambar 4.9 Apel Pagi Satpol PP Kabupaten Bogor

Kondisi ini menunjukkan bahwa pesan KTR belum diperkuat oleh elemen visual yang memadai.

2. Daya Tarik Kredibilitas

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

a. Keahlian Aparat

Keahlian aparat dalam komunikasi persuasif masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pelatihan khusus. Sebagian aparat telah menunjukkan kemampuan yang baik, namun belum konsisten.

b. Keterpercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat masih bervariasi. Sebagian masyarakat menilai aparat cukup profesional, namun belum melihat konsistensi dalam penegakan KTR. Kurangnya intensitas interaksi menjadi faktor utama rendahnya kepercayaan ini.

c. Daya Tarik Masyarakat terhadap Aparat

Daya tarik aparat terlihat dari sikap ramah dan pendekatan humanis. Hal ini menjadi nilai positif dalam komunikasi persuasif. Namun, karena tidak dilakukan secara konsisten, daya tarik ini belum mampu membentuk hubungan yang kuat dengan masyarakat.

3. Model Komunikasi Persuasif

Model komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor merupakan suatu kerangka yang menggambarkan bagaimana proses penyampaian pesan dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Model ini tidak hanya menempatkan komunikasi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang bertujuan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya lingkungan bebas asap rokok.

Berdasarkan hasil penelitian, model komunikasi persuasif yang diterapkan memiliki tiga komponen utama, yaitu pesan persuasif, media komunikasi, dan metode pendekatan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem komunikasi yang utuh. Dalam praktiknya, keberhasilan model ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, kemampuan aparat dalam berkomunikasi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

a. Pesan Persuasif

Pesan persuasif merupakan inti dari proses komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian, pesan yang disampaikan tidak hanya berisi larangan merokok, tetapi dikembangkan secara lebih komprehensif melalui tiga substansi utama, yaitu edukasi mengenai KTR, informasi tentang bahaya rokok, serta penjelasan mengenai sanksi pelanggaran.

Edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok menjadi dasar utama dalam penyampaian pesan. Aparat berupaya menjelaskan secara rinci mengenai batasan wilayah yang termasuk dalam KTR, seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, serta ruang publik lainnya. Penjelasan ini bertujuan untuk mengurangi ambiguitas di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok. Selain itu, edukasi juga mencakup tujuan kebijakan KTR sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami nilai dan tujuan di balik kebijakan tersebut.

Selanjutnya, penyampaian informasi mengenai bahaya rokok menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Informasi ini tidak hanya berfokus pada dampak kesehatan bagi perokok aktif, tetapi juga menekankan risiko bagi perokok pasif. Dalam praktiknya, aparat sering mengaitkan pesan dengan kondisi nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti dampak terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini membuat pesan menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan peluang terjadinya perubahan sikap.

Komponen ketiga adalah penjelasan mengenai sanksi bagi pelanggaran KTR. Penyampaian sanksi berfungsi sebagai bentuk penguatan pesan dengan memberikan konsekuensi yang jelas bagi pelanggar. Sanksi tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebijakan KTR memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan adanya informasi

ini, masyarakat diharapkan dapat mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan dan lebih berhati-hati dalam berperilaku.

Efektivitas pesan persuasif sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian. Aparat berusaha menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang konkret, serta pendekatan yang komunikatif agar pesan dapat diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Penyesuaian ini menjadi penting mengingat heterogenitas masyarakat Kabupaten Bogor dari segi pendidikan, usia, dan kondisi sosial. Dengan demikian, pesan persuasif tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

b. Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan persuasif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kabupaten Bogor menggunakan berbagai jenis media komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komunikasi langsung menjadi media yang paling dominan, terutama melalui kegiatan sosialisasi dan interaksi tatap muka di lapangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat patroli atau penertiban di kawasan KTR. Melalui komunikasi langsung, aparat dapat berinteraksi secara dua arah dengan masyarakat, memberikan penjelasan, serta menjawab pertanyaan yang muncul. Interaksi ini memungkinkan terjadinya klarifikasi, sehingga pesan dapat dipahami secara lebih mendalam.

Selain itu, media visual seperti spanduk, banner, stiker, dan papan larangan merokok juga digunakan sebagai sarana penyampaian informasi. Media ini ditempatkan di lokasi strategis seperti pintu masuk gedung, area publik, dan tempat usaha. Fungsi utama media visual adalah sebagai pengingat yang bersifat terus-menerus, sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi meskipun tidak berinteraksi langsung dengan aparat.

Pemanfaatan media sosial juga mulai dilakukan sebagai bagian dari strategi komunikasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan media digital menjadi semakin relevan untuk mendukung efektivitas komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi berbagai media komunikasi memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan jangkauan pesan. Komunikasi langsung efektif dalam membangun pemahaman mendalam, sedangkan media visual dan digital berfungsi memperkuat serta mengulang pesan secara berkelanjutan. Sinergi antara berbagai media ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan KTR.

c. Metode Pendekatan

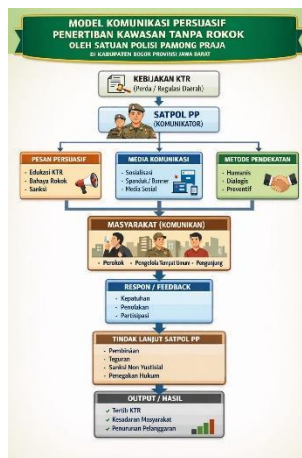
Metode pendekatan merupakan cara yang digunakan oleh Satpol PP dalam menyampaikan pesan persuasif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga pendekatan utama yang diterapkan, yaitu pendekatan humanis, dialogis, dan preventif.

Pendekatan humanis ditunjukkan melalui sikap aparat yang santun, ramah, dan tidak menimbulkan tekanan. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, aparat berusaha menciptakan suasana komunikasi yang nyaman dengan menghargai masyarakat sebagai mitra. Penggunaan bahasa yang sopan, intonasi yang tidak mengintimidasi, serta gestur yang terbuka menjadi ciri utama pendekatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan humanis mampu mengurangi resistensi masyarakat dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparat dan masyarakat.

Pendekatan dialogis menekankan pada komunikasi dua arah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Aparat memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta memberikan tanggapan. Melalui pendekatan ini, terjadi pertukaran informasi yang lebih terbuka, sehingga pesan dapat dipahami secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan dialogis juga membantu aparat memahami kondisi dan persepsi masyarakat, sehingga komunikasi dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum tindakan penertiban dilakukan. Pendekatan ini diwujudkan melalui sosialisasi, pemasangan tanda larangan, serta pemberian imbauan secara berkala. Dengan adanya upaya preventif, masyarakat diharapkan telah memiliki pengetahuan dan kesadaran sebelum melakukan aktivitas di ruang publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pendekatan tersebut memberikan dampak positif terhadap respons masyarakat. Pendekatan yang komunikatif dan tidak konfrontatif cenderung menghasilkan tingkat penerimaan yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Namun, efektivitas pendekatan ini masih dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan dan tingkat kesadaran masyarakat.



Gambar 4.10 Model Komunikasi Persuasif Satpol PP

Bagan tersebut menggambarkan bahwa proses komunikasi persuasif dimulai dari kebijakan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum. Satpol PP berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan melalui berbagai media dan pendekatan. Masyarakat sebagai komunikan memberikan respons berupa kepatuhan, penolakan, atau partisipasi. Respons tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembinaan atau penegakan hukum.

Secara keseluruhan, model komunikasi persuasif ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KTR tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada efektivitas komunikasi yang dilakukan. Pendekatan yang terintegrasi antara pesan, media, dan metode menjadi kunci dalam membangun kesadaran serta meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Hambatan dan Upaya dalam Penertiban KTR

a. Hambatan

Pelaksanaan komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satpol PP Kabupaten Bogor masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang beragam. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam penguatan argumen dan bukti. Pesan yang disampaikan aparat masih cenderung bersifat normatif, yakni sebatas menyampaikan larangan dan aturan tanpa disertai pendekatan yang lebih kontekstual dan menyentuh pengalaman nyata masyarakat. Akibatnya, pemahaman masyarakat hanya berhenti pada tingkat pengetahuan, belum sampai pada perubahan sikap dan perilaku.

Selain itu, budaya merokok yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tantangan yang cukup besar. Aktivitas merokok sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi bagian dari interaksi sosial. Kondisi ini menyebabkan pesan persuasif yang disampaikan aparat sering kali tidak sejalan dengan nilai yang dianut masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi atau penolakan secara tidak langsung.

Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya kredibilitas aparat dalam persepsi masyarakat. Meskipun memiliki kewenangan formal, aparat Satpol PP masih sering dipandang sebagai penegak aturan yang bersifat represif, bukan sebagai komunikator yang edukatif. Persepsi ini menciptakan jarak psikologis antara aparat dan masyarakat, sehingga proses komunikasi tidak berjalan secara terbuka dan efektif.

Di sisi lain, keterbatasan intensitas dan kontinuitas komunikasi juga menjadi kendala. Sosialisasi dan patroli belum dilakukan secara rutin dan merata, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi secara konsisten. Kurangnya pengulangan pesan berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR.

b. Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa upaya perbaikan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas komunikasi persuasif. Salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Aparat mulai mengaitkan aturan KTR dengan dampak langsung bagi masyarakat, seperti kesehatan dan kenyamanan lingkungan, sehingga pesan menjadi lebih relevan.

Selain itu, peningkatan konsistensi sikap dan tindakan aparat juga dilakukan melalui penertiban langsung di lapangan, termasuk penertiban atribut promosi rokok. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan aturan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya lainnya adalah intensifikasi sosialisasi dan patroli rutin di kawasan KTR. Melalui kegiatan ini, aparat tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun belum sepenuhnya optimal, langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi persuasif dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pelanggaran di berbagai lokasi serta belum meratanya pemahaman masyarakat terkait kawasan yang termasuk KTR.

Ditinjau dari teori komunikasi persuasif DeVito (2019), efektivitas komunikasi belum optimal pada dimensi penguatan argumen, daya tarik psikologis, dan kredibilitas komunikator. Meskipun Satpol PP telah melakukan sosialisasi, patroli, dan pendekatan humanis, keterbatasan media komunikasi, kurangnya intensitas sosialisasi, serta kuatnya budaya merokok menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, komunikasi persuasif telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afriato, I. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI KOTA PALU TAHUN 2019. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 21, Number 1).
- A'yuni, R. A., & Nasrullah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>
- Creswell, J. W. (n.d.). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. In *Qualitative Health Research* (Vol. 9, Number 5).

- Devito. (2017). Joseph A. Devito The Interpersonal Communication Book. In Jurnal Sains dan Seni ITS (Vol. 6, Number 1).
- Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, & Farid Agushybana. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI), 6(3). <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i3.3284>
- Fatonah S, Amatiria, G. (2021). Kepatuhan warga terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di Lampung Selatan. Jurnal Keperawatan, 12(1).
- Marchel, Y. A. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. Jurnal PROMKES, 7(2). <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155>
- Moleong, J. L. (2019). Motodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Rochka, M. M., Anwar, A. A., & Rahmadani, S. (2019). Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.
- Wulandari, Darmawansyah, Theresiana, Y., Rohani, T., & Hermawati, D. (2024). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Lebong. Jurnal Promotif Preventif, 7(4).